



**STRATEGI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PEMERINTAH
DESA SINDANG KEC. DUKUHWARU KAB. TEGAL UNTUK
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1
(S1) untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di Program Studi Ilmu
Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Oleh:

SATRIA SYABAN PAMUNGKAS

NIM 229500028

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2024



**STRATEGI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PEMERINTAH
DESA SINDANG KEC. DUKUHWARU KAB. TEGAL UNTUK
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1
(S1) untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di Program Studi Ilmu
Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Oleh:

SATRIA SYABAN PAMUNGKAS

NIM 229500028

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :Satria Syaban Pamungkas

NPM :2219500028

Jenjang :Strata Satu (S1)

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH DESA SINDANG KEC. DUKUHWARU KAB. TEGAL UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN”** adalah benar-benar hasil penelitian dari saya sendiri, kecuali pada bagian yang diambilkan dari kutipan menurut sumbernya.

Apabila dikemudian hari ditemukan plagiat atau meniru hasil penelitian orang lain yang sama dengan 90% dan muncul permasalahan terhadap penelitian yang dilakukan oleh saya. Maka saya bertanggungjawab terhadap keseluruhan isi SKRIPSI ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran.

Tegal, 1 September 2024

P The image shows a 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '21EEAALX335596512'. The signature is written in black ink over the stamp.

Satria Syaban Pamungkas

NPM:2219500028

LEMBAR PERSETUJUAN



**STRATEGI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PEMERINTAH
DESA SINDANG KEC. DUKUHWARU KAB. TEGAL UNTUK
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN**

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan program Studi
Starata 1 (S1) untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di Program
Studi Ilmu Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Pancasakti Tegal

1 September 2024
Telah disetujui oleh,

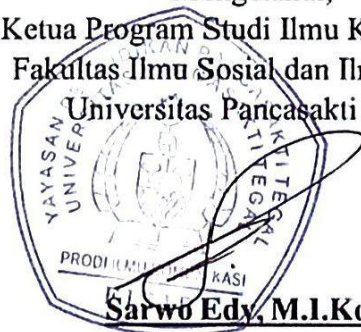
Dosen Pembimbing I

Dra. Oemi Hartati, M.Si
NIPY 4251421959

Dosen Pembimbing II

Ike Desi Florina, M.I.Kom
NIPY 8941500020

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pancasakti Tegal



Sarwo Edy, M.I.Kom
NIPN 27061151985



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
Jl. Halmahera KM.1 Tegal Telp: (0283) 32390**

PENGESAHAN SKRIPSI

**STRATEGI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PEMERINTAH
DESA SINDANG KEC. DUKUHWARU KAB. TEGAL UNTUK
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN**

Telah dipertahankan dalam sidang terbuka skripsi Program Studi Ilmu
Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal

Pada Hari Kamis
Tanggal 18 Januari 2024

1. Ketua Dewan Penguji: **Diryo Suparto, S.Sos, M.Si**
NIPY.28662871979
2. Anggota Penguji 1: **Dra. Oemi Hartati, M.Si**
NIPY.4251421959
3. Anggota Penguji 2: **Ike Desi Florina, M.I.Kom**
NIPY.23768121984

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Unggul Sugiharto, S.IP. M.Si
NIPY : 1425192173

MOTTO:

**“INDONESIA TIDAK AKAN BERCAHAYA
KARENA OBOR BESAR DI JAKARTA.
TAPI INDONESIA AKAN BERCAHAYA
KARENA LILIN-LILIN DI DESA”**

-BUNG HATTA-

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada keluarga besar penulis, terutama kedua orang tua penulis terkasih. Segenap *civitas* akademika UPS Tegal terutama di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Kepada segenap dosen dan karyawan Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UPS TEGAL. Kepada dosen pembimbing penulis: Ibu Oemi Hartati dan Ibu Ike Florina. Kepada pemerintah dan masyarakat Desa Sindang. Dan terakhir kepada diri penulis sendiri sebagai pengingat bahwa ilmu pengetahuan, terutama di bidang komunikasi, sangatlah luas.

ABSTRAK

Satria Syaban Pamungkas. 2219500028. **KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PEMERINTAH DESA SINDANG KEC. DUKUHWARU KAB. TEGAL UNTUK MENINGKATKAN PASRTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN.** SKRIPSI. Pembimbing I: Dra. Oemi Hartati, M.Si. Pembimbing II: Ike Desi Florina, M.I.Kom. Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.

Komunikasi adalah salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan. Fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan pembangunan seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Pemerintah desa memiliki peran utama dalam komunikasi pembangunan di desa sehingga pembangunan yang direncanakan berjalan tanpa hambatan dan mendapat dukungan dari masyarakat desa. Penelitian yang berjudul “Komunikasi Pembangunan Pemerintah Desa Sindang Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan” ini mengambil lokasi penelitian di Desa Sindang Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui komunikasi pembangunan Pemerintah Desa Sindang dalam membangun infrastruktur di Desa Sindang, baik berupa fisik maupun non fisik. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tahap pengumpulan data penelitian yaitu melakukan proses wawancara tatap muka dengan narasumber, observasi dan dokumentasi, hasil pengamatan, dan hasil pembicaraan yang dianalisis peneliti hingga tahap penarikan simpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sindang Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal berjalan dengan baik. Terbukti setiap pembangunan di Desa Sindang selalu berjalan dengan lancar. Informasi-informasi tentang pembangunan disampaikan dan disosialisasikan oleh Pemerintah Desa Sindang dengan berbagai macam saluran komunikasi seperti melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa atau Musrenbangdes dan melalui papan informasi sehingga informasi tentang pembangunan di Desa Sindang tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan di Desa Sindang.

Kata kunci: Komunikasi, Pembangunan, Infrastruktur, Pemerintah Desa

ABSTRACT

Satria Syaban Pamungkas. 2219500028. **COMMUNICATION FOR DEVELOPMENT OF THE SINDANG VILLAGE GOVERNMENT DISTRICT DUKUHWARU TEGAL REGENCY TO INCREASE SOCIETY PARTICIPATION IN DEVELOPMENT.** ESSAY. *Advisor I:* Dra. Oemi Hartati, M.Sc. *Advisor II:* Ike Desi Florina, M.I.Kom. *Communication Studies Program, Faculty of Social and Political Sciences, Pancasakti University, Tegal.*

Communication is one of the keys to success in development. Its main function is to increase community participation in various stages of development such as planning, implementation and evaluation of development. The village government has a major role in communicating development in the village so that planned development runs without obstacles and receives support from the village community. The research entitled "Communication for Development of the Sindang Village Government District Dukuhwaru Tegal Regency to Increase Society Participation in Development" took the research location in Sindang Village, Dukuhwaru Sub District, Tegal. The aim of this research is to determine the development communication of the Sindang Village Government in building infrastructure in Sindang Village, both physical and non-physical. This type of research is descriptive qualitative. The research data collection stage is carrying out a face-to-face interview process with sources, observation and documentation, observation results, and conversation results which are analyzed by the researcher until the stage of drawing conclusions. Based on the results of this research, the researcher concluded that development communication carried out by the Sindang Village Government District Dukuhwaru Tegal Regency was going well. It is proven that every development in Sindang Village always runs smoothly. Information about development is conveyed and socialized by the Sindang Village Government using various communication channels such as through the Village Development Plan Deliberation or Musrenbangdes and through information boards so that information about development in Sindang Village can be conveyed well to the community so that the community can participate in every development stages starting from planning, implementation, to evaluation of development in Sindang Village.

Keywords: *Communication, Development, Infrastructure, Development Village*

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan anugerah yang begitu besar kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PEMERINTAH DESA SINDANG KEC. DUKUHWARU KAB. TEGAL UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN”** ini sebagai syarat untuk menamatkan program Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.

Selama penyusunan skripsi ini, tentunya penulis mengalami beberapa hambatan. Namun berkat bantuan dari sejumlah pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak tersebut, antara lain:

1. Prof. Dr. Taufiqullah, M.Hum selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal
2. Unggul Sugi Harto, S.IP., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal
3. Sarwo Edy, M.I.Kom selaku Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal
4. Dra. Oemi Hartati, M.Si selaku pembimbing I penulis dalam menyelesaikan penelitian atau skripsi ini yang dengan sabar dan penyanyang selalu mendukung dan membimbing penulis hingga akhir

5. Ike Desi Florina, M.I.Kom selaku pembimbing II penulis dalam menyelesaikan penelitian atau skripsi ini yang dengan sabar dan telaten dalam membimbing penulis hingga akhir
6. Segenap dosen Ilmu Komunikasi FISIP UPS Tegal: Pak Didi, Pak Zaini Bisri, Bu Inas, Pak Diryo, dan lain semuanya
7. Kedua orang tua dan semua anggota keluarga penulis
8. Pemerintah Desa Sindang
9. Diri penulis sendiri.

Tegal, 1 September 2024

Satria Syaban Pamungkas
NPM: 2219500028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	19
I.3 Tujuan Penelitian	19
I.4 Manfaat Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
II.1 Kerangka Teori.....	21
II.2 Definisi Konsep.....	35
II.3 Pokok-pokok Penelitian.....	47
II. 4 Alur Pikir Penelitian	47
BAB III METODE PENELITIAN	49
III.1 Jenis dan Tipe Penelitian.....	49
III.2 Jenis dan Sumber Data	50
III.3 Informan Penelitian.....	50
III.4 Teknik Pengumpulan Data.....	53
III.5 Teknik dan Analisis Data	54
III.6 Sistematika Penulisan.....	55
BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	56

IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	56
IV.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sindang	60
BAB V HASIL PENELITIAN	62
BAB VI PEMBAHASAN.....	71
VI.1 Unsur Komunikasi Pembangunan di Desa Sindang	71
VI.2 Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Desa Sindang.....	85
VI.3 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	90
BAB VII PENUTUP.....	101
VII.1 Simpulan.....	101
VII.2 Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN.....	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Panjang Jalan Tol Beroperasi di Indonesia	6
Gambar 2. Panjang Jalan di Indonesia Menurut Kewenangan	7
Gambar 3. Panjang Jalan di Jawa Menurut Kewenangan (2020)	8
Gambar 4. Profil Jalan Kabupaten Tegal	9
Gambar 5. Musrenbang Desa Sindang	17
Gambar 6. Persentase luas desa di Kecamatan Dukuhwaru	57
Gambar 7. Jarak Desa Sindang dengan Ibukota Kecamatan Dukuhwaru.....	58
Gambar 8. Kepadatan penduduk tiap desa di Kecamatan Dukuhwaru.....	59
Gambar 9. Informasi pembangunan tahun 2023 di Desa Sindang.....	75
Gambar 10. Musrenbangdes di Desa Sindang	78
Gambar 11. Banner pembangunan kantor Bumdes di lokasi pembangunan	79
Gambar 12. Pembangunan di Desa Sindang	83
Gambar 13. Partisipasi masyarakat Desa Sindang dalam pembangunan.....	84
Gambar 14. Website resmi Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	24
Tabel 2. Unsur-unsur Komunikasi Pembangunan menurut Riva'i	30
Tabel 3. Alur Pikir Penelitian	48
Tabel 4. Profil Informan.....	52
Tabel 5. Struktur Pemerintah Desa Sindang	60
Tabel 6. Struktur BPD Desa Sindang.....	60
Tabel 7. Nama-nama Ketua RW dan Ketua RT Desa Sindang.....	61
Tabel 8. Hasil Wawancara dengan Informan Kunci dan Utama.....	63
Tabel 9. Hasil Wawancara dengan Informan Pnedukung.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Draft Wawancara dengan Narasumber/Informan.....	106
Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber/Informan.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.

Kewenangan desa yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan NKRI untuk menjalankan sistem pemerintahannya sendiri dalam mengatur segala urusan dan kepentingan di dalamnya berdasarkan prakarsa dari masyarakat ini juga disebutkan di Pasal 18 UU tentang Desa: “Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa”.

Sebagaimana dalam uraian di atas, salah satu kewenangan desa adalah melaksanakan pembangunan. Menurut Todaro (Hardjanto, 2011:2), pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses multidimensional yang meliputi perubahan dalam struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan nasional. Selain itu, pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan

nasional, dan pemberantasan kemiskinan. Guna mencapai sasaran yang diinginkan, maka pembangunan dapat diarahkan pada tiga hal pokok, yaitu meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial dalam kehidupannya.

Sementara itu, Siagian memberi pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Sedangkan Ginanjar Kartasasmita memberi pengertian tentang pembangunan dengan lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana (Hardjanto, 2011:18).

Dari definisi tentang pembangunan yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan sosial yang terarah, terencana, dan dilakukan secara sadar untuk menuju ke arah kondisi masyarakat yang lebih baik dan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang bersangkutan.

Kemudian berbicara tentang pembangunan, secara umum ada dua jenis pembangunan, yaitu pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (Kuncoro, 2010 dalam Meidiani, 2013:520). Contoh dari pembangunan fisik adalah infrastruktur seperti jembatan atau jalan raya. Sedangkan

pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama (Wresniworo, 2007 dalam Meidiani, 2013:521).

Berkaitan dengan hal ini, Pramana (2013, 587) mengatakan: “Di dalam pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak dibidang fisik tetapi juga harus bergerak di bidang non fisik atau sosial. Oleh karena itu, pembangunan hendaknya harus adanya keseimbangan antara pembangunan fisik ataupun non fisiknya. Yang menjadi bagian dari pembangunan non fisik atau sosial yaitu: pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan”.

Hal itu berarti bahwa pembangunan untuk mencapai suatu keadaan masyarakat yang sejahtera, harus dilakukan dengan seimbang. Pembangunan fisik semata tidak akan berhasil mencapai tujuan utama pembangunan dengan maksimal. Bagi masyarakat, pembangunan fisik seperti pengaspalan jalan, pembuatan irigasi pertanian, transportasi, dan lain sebagainya itu mungkin dampaknya bisa langsung dirasakan. Namun apabila pembangunan fisik tersebut tidak dibarengi atau diimbangi dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan atau peningkatan sumber daya manusia (SDM), sosial dan budaya, ekonomi dan kesehatan, sampai pendidikan masyarakat maka bisa dikatakan bahwa pembangunan masih belum berhasil mencapai tujuannya. Untuk itu harus ada keseimbangan dalam melakukan pembangunan, sehingga tujuan pembangunan bisa tercapai secara maksimal.

Sebelum masuk pada pembahasan pembangunan desa, perlu diketahui terlebih dahulu istilah atau konsep pembangunan nasional. Menurut Heliarta (2019:2), pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan atau mengadakan perubahan-perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Sedangkan nasional adalah sesuatu yang berhubungan dengan karakteristik atau ciri-ciri khas suatu bangsa tertentu dalam hal ini bangsa Indonesia. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembangunan nasional merupakan pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat dalam berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga sosial budaya dan politik dengan senantiasa harus merupakan perwujudan wawasan Nusantara.

Pembangunan nasional adalah cermin bagi bangsa Indonesia untuk selalu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya, serta dapat merefleksikan penyelenggara negara yang adil, demokratis dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Hakikatnya, pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Maka dari itu, tujuan akhir pembangunan harus berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan.

Pancasila yang merupakan dasar negara dan falsafah hidup masyarakat Indonesia mengandung tujuan utama pembangunan nasional. Hal ini dijelaskan pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV: “... *membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut*

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...”

Pembangunan nasional Indonesia adalah pengamalan Pancasila dan harus mencakup pembangunan di seluruh aspek atau bidang kehidupan masyarakat Indonesia, baik fisik maupun non fisik. Salah satu pembangunan yang terus dan gencar dilakukan oleh Pemerintahan Indonesia saat ini adalah pembangunan di bidang fisik berupa infrastruktur jalan raya, baik jalan tol yang berbayar maupun jalan nasional. Dikutip dari laman *Katadata.com*, jalan tol sendiri merupakan jalan yang bebas hambatan dan merupakan bagian dari jalan nasional. Tidak seperti jalan umum yang sering dilalui oleh masyarakat atau pengendara dengan gratis, pengguna jalan tol harus mengeluarkan biaya retribusi. Peran jalan tol ini pun sangat strategis dalam memudahkan distribusi barang atau jasa antara wilayah satu dengan wilayah lain. Selain itu, dengan menggunakan jalan tol, pengguna bisa meminimalisir beban logistik lainnya.

Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR (dalam *Katadata.com*), sampai September 2022 lalu, tercatat bahwa sudah ada 68 jalan tol dengan total panjang mencapai 2.545 kilometer (km) yang telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Untuk jalan tol terpanjang ada di Pulau Jawa, terdiri dari Tol Jabodetabek, Trans Jawa, dan Non-Trans Jawa. Jika ini digabung menjadi satu, maka panjangnya bisa mencapai 1.667,84 km atau 65 persen dari total keseluruhan panjang jalan tol yang ada di Indonesia. Selain yang sudah beroperasi, masih ada 27 ruas dengan panjang 1.813 km yang sampai bulan September 2022 lalu masih dalam tahap pengerjaan. Proyek jalan tol yang masih

dalam pengerjaan atau pembangunan ini paling banyak ada di Pulau Sumatra atau Trans Sumatera, yaitu panjangnya mencapai 925,55 km.

Berikut ini diagram panjang jalan tol yang beroperasi di Indonesia sampai bulan September 2022 lalu.

Gambar 1. Panjang Jalan Tol Beroperasi di Indonesia



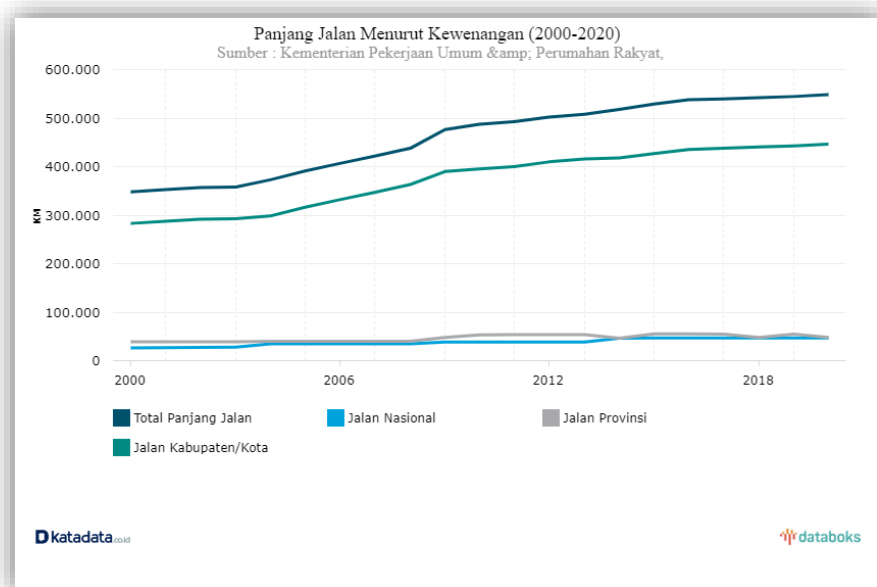
Sumber: Katadata.com

Selain jalan tol, pemerintah juga terus melakukan pembangunan dan pembenahan jalan raya nasional. Jalan raya adalah salah satu sarana infrastruktur yang sangat penting bagi peningkatan perekonomian nasional. Selain untuk memudahkan mobilitas masyarakat Indonesia, jalan raya juga berperan sangat vital dalam mendukung logistik atau pengiriman barang antar daerah. Mengutip data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2000 menurut kewenangannya, panjang jalan raya di Indonesia hanya mencapai 348,08 ribu km.

Namun dalam dua puluh tahun terakhir atau pada tahun 2020, panjang jalan raya di Indonesia telah bertambah menjadi 548,37 km atau sekitar 57,54 persen.

Menurut kewenangannya, panjang jalan kewenangan pemerintah pusat pada tahun 2020 mencapai 47,02 ribu km. Panjang jalan tersebut meningkat 79 persen dari tahun 2000 lalu. Sedangkan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi meningkat sekitar 40,94 persen atau naik menjadi 54,85 ribu km. Sementara itu jalan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota naik sekitar 57,83 persen atau bertambah panjang 446,5 ribu km pada tahun 2020 atau dibanding posisi pada tahun 2000 silam.

Gambar 2. Panjang Jalan di Indonesia Menurut Kewenangan

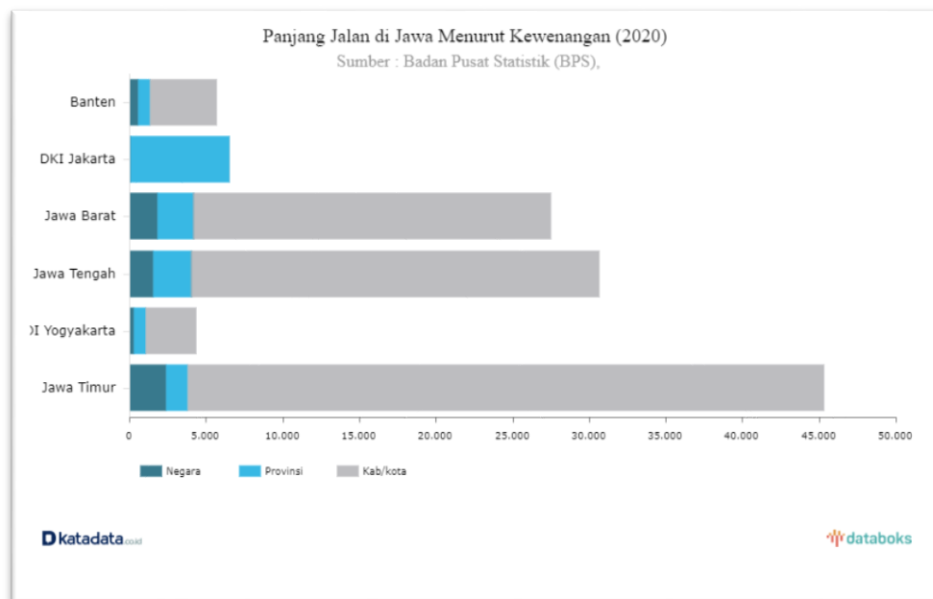


Sumber: Katadata.com

BPS juga menyebutkan bahwa jalan raya yang ada di Pulau Jawa telah mencapai panjang 104.0053 km dengan rincian sepanjang 5.916 km kewenangan pemerintah pusat, 7.066 km kewenangan pemerintah provinsi, dan 91.071 km

kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Di Jawa Tengah, sampai tahun 2020 lalu, panjang jalannya mencapai 30.667 km dengan rincian jalan sepanjang 1.518 km adalah kewenangan negara, 2.501 km merupakan jalan kewenangan pemerintah provinsi, dan 26.648 km merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota.

Gambar 3. Panjang Jalan di Jawa Menurut Kewenangan (2020)



Sumber: Katadata.com

Sementara itu, menurut data dari Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Tegal dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, sampai pada tahun 2021 lalu, panjang jalan di Kabupaten Tegal telah mencapai 890,2 km. Panjang jalan tersebut menurut kewenangannya dibagi menjadi dua, jalan provinsi sepanjang 42,93 km dan 847,27 km merupakan jalan kabupaten. Dari data ini dikatakan bahwa pertumbuhan jalan di Kabupaten Tegal selama 7 tahun terakhir (sebelum 2021) relatif stagnan. Namun terdapat peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan kondisi jalan tersebut. Tercatat pada akhir tahun 2021, panjang jalan dengan kondisi baik di Kabupaten Tegal mencapai panjang 603,70 km atau 71,25 persen

dari keseluruhan jalan yang ada. Sedangkan persentase jalan provinsi di Kabupaten Tegal yang dalam kondisi baik adalah 43,12 persen.

Gambar 4. Profil Jalan Kabupaten Tegal



Sumber: Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Tegal

Dari gambar di atas bisa dilihat bahwa sejak tahun 2015 sampai tahun 2021, terjadi peningkatan terkait kondisi jalan di Kabupaten Tegal. Jika pada tahun 2015 jalan di Kabupaten Tegal yang dalam kondisi baik kurang dari 400 km, pada akhir tahun 2021 atau dalam kurun waktu 7 tahun, jalan dengan kondisi baik meningkat menjadi 600 km lebih. Dengan demikian, secara otomatis jalan yang dalam kondisi sedang, rusak ringan, sampai rusak berat, turun menjadi tidak lebih dari 200 km.

Kemudian, berbicara tentang pembangunan nasional, sudah barang tentu hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari pembangunan desa. Dalam pembangunan nasional Indonesia, desa memiliki peranan yang sangat penting. Pembangunan desa adalah bagian tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian pembangunan nasional. Pembangunan desa sebagaimana menurut Ginandjar Kartasmita (1996: 392-393), adalah rancangan dari strategi untuk meningkatkan taraf kehidupan, baik sosial

maupun ekonomi, orang-orang desa. Dengan arti luas, pembangunan perdesaan memuat banyak aspek atau bidang kehidupan masyarakat desa seperti bidang sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga politik yang mengintegrasikan peran pemerintah desa dan masyarakatnya dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya untuk pembangunan secara efektif untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat di desa secara berkesinambungan. Pembangunan perdesaan juga bisa dilihat sebagai terencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup di bidang pendidikan, kesehatan dan perumahan masyarakat desa.

Sedangkan menurut Naufal (2020:2), membangun desa merupakan sesuatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan perubahan-perubahan dan pertumbuhan dalam segala bidang yang dilaksanakan dalam suatu masyarakat hukum tertentu dan adanya partisipasi masyarakat desa dalam bentuk swadaya dan gotong royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan.

Dengan kata lain, pembangunan desa diartikan sebagai upaya atau usaha perubahan yang terencana dan dengan sadar dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat di dalamnya berdasarkan prakarsa dari masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal dan partisipasi masyarakat desa untuk menuju kondisi yang lebih baik dari sebelumnya, yaitu peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Hal tersebut sebagaimana tercantum dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berturut-turut di Pasal 78 ayat 1, 2, dan 3 dalam

Undang-Undang Desa disebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Dalam melakukan pembangunan di desa, adalah tugas dari pemerintah desa, dalam hal ini adalah Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa. Namun dalam setiap tahapannya, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan, pemerintah desa harus mengikutsertakan atau melibatkan masyarakat desa. Dengan kata lain, dalam pembangunan desa, dibutuhkan partisipasi atau keikutsertaan atau keterlibatan dari masyarakat. Hal ini agar dapat tercapai tujuan pembangunan dari pembangunan desa.

Menurut Solekhan (dalam Ramadhan, 2021:1), dibutuhkan partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Sedangkan partisipasi masyarakat tidak akan mungkin terjadi tanpa pengenalan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Partisipasi masyarakat desa sama pentingnya dengan partisipasi pemerintah desa dalam pembangunan jalan, karena masyarakat sendiri merupakan tujuan pembangunan desa. Partisipasi sebagai masyarakat desa merupakan bentuk

penyelenggaraan negara karena adanya komunitas kausal, hubungan yang sinergis dalam kerangka pembangunan desa.

Karena partisipasi dari masyarakat sangatlah penting dalam setiap tahapan pembangunan desa, maka dibutuhkan upaya untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat tersebut. Dalam praktiknya hal ini dilakukan melalui komunikasi pembangunan. Menurut Nasution (2002:106), komunikasi pembangunan memiliki pengertian secara luas dan terbatas. Dalam arti luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha melakukan pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai penilaian terhadap hasil pembangunan. Sedangkan dalam arti yang terbatas, komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara serta teknik penyampaian gagasan dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan yang disampaikan tadi.

Sementara menurut Kiki Novriansyah (2019:2), secara konseptual, komunikasi pembangunan bersumber dari teori komunikasi dan teori pembangunan yang mana keduanya saling menopang satu sama lain. Teori komunikasi digunakan untuk menjembatani arus informasi antara pemerintah kepada masyarakat atau sebaliknya. Sedangkan teori pembangunan digunakan sebagai karakteristik bentuk

perubahan secara terarah dan progresif dari satu kondisi ke kondisi yang lain atau dari satu keadaan menuju keadaan lain yang lebih baik.

Bisa dilihat bahwa komunikasi dan pembangunan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Kesuksesan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari peran komunikasi sebagai salah satu elemen penting di dalamnya. Komunikasi pembangunan sangat dibutuhkan untuk memperlancar arus informasi pembangunan. Dengan kata lain, komunikasi pembangunan adalah suatu usaha atau proses penyebaran pesan atau informasi berupa ide atau gagasan tentang pembangunan dari komunikator, atau yang memiliki inisiatif untuk melakukan pembangunan, kepada masyarakat luas.

Dalam hal ini, komunikasi pembangunan adalah jembatan yang menghubungkan antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Dengan kata lain berarti bagaimana suatu ide atau gagasan yang berkaitan dengan pembangunan disampaikan oleh pemerintah desa, sebagai *opinion leader* atau pemrakarsa yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan desa, kepada masyarakat desa sehingga menimbulkan efek timbal balik yang dapat bermanfaat untuk pembangunan desa.

Untuk itu pemerintah desa perlu merumuskan strategi-strategi komunikasi yang tepat agar pesan atau ide/gagasan pembangunan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat desanya. Pesan pembangunan yang tersampaikan dengan baik, dapat mewujudkan berbagai bentuk partisipasi atau keikutsertaan/keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Partisipasi masyarakat ini dapat

membuat arah pembangunan yang sesuai dengan prakarsa atau kebutuhan masyarakat desa. Pada akhirnya pembangunan desa akan mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuannya, yaitu kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Salah satu desa yang saat ini sedang gencar melakukan pembangunan dalam berbagai bidang adalah Desa Sindang. Desa Sindang sendiri merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Dikutip dari *Kecamatan Dukuhwaru dalam Angka 2023*, Desa Sindang memiliki luas wilayah 1,62 km persegi. Sementara itu, secara geografis, desa yang terdiri dari enam rukun warga (RW) dan 24 rukun tetangga (RT) ini berbatasan langsung dengan Desa Kalisoka di sebelah timur; Desa Pagiyantem di sebelah utara; Desa Gumayun di selatan; dan Desa Dukuhwaru di barat.

Masih dari buku *Kecamatan Dukuhwaru dalam Angka 2023*, jumlah penduduk di Desa Sindang sampai pada akhir tahun 2022 lalu ada sekitar 4.856 orang. Jumlah ini terdiri dari 2.448 laki-laki dan 2.408 perempuan, serta 1.603 kepala keluarga (KK). Terdapat sejumlah fasilitas umum di Desa Sindang seperti dua sekolah dasar (SD) negeri, satu taman kanak-kanak atau TK, satu tempat atau fasilitas pendidikan untuk anak usia dini atau PAUD, 11 Mushola dan tiga Masjid serta satu Poskesdes.

Salah satu pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sindang pada tahun 2023 ini adalah tempat pembuangan/pengelolaan sampah. Urgensi dari pembangunan ini adalah karena sebelumnya di Desa Sindang tidak ada tempat pembuangan sampah, sehingga masyarakat sering membuang sampah di sembarang

tempat yang akhirnya membuat kotor lingkungan dan mengancam kesehatan. Selain itu, pembangunan fasilitas pengelolaan sampah ini diperuntukan sebagai badan usaha milik desa atau BUMDes untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa atau PADes. Hal itu karena berdasarkan data terbaru yang tertuang dalam Peraturan Desa Sindang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2023, PADes Sindang hanya sebesar Rp. 136.800.00 rupiah.

Meski pada tahun yang sama pendapatan Desa Sindang mencapai Rp. 2.020.181.252 rupiah dengan rician dari Dana Desa sebesar Rp. 1.027.541.000 rupiah; Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 46.197.495 rupiah; Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 438.642.757 rupiah; Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 90.000.000 rupiah; Bantuan Keuangan Kabupaten sebesar Rp. 280.000.000 rupiah; dan Bunga Bank sebesar Rp. 1.000.000 rupiah.

Namun untuk Belanja Desa dengan rincian Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 866.210.226 rupiah; Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp. 1.019.948.204 rupiah; Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 69.733.495 rupiah; Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 38.000.000 rupiah; Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa Rp. 154.400.000 rupiah, yang jika ditotal mencapai Rp. 2.148.291.925 rupiah, maka untuk melakukan pembangunan di sejumlah bidang masih minus Rp. 128.110.673 rupiah.

Maka dari itu agar pada tahun-tahun berikutnya tidak ada kendala terkait kurangnya pembiayaan untuk melakukan pembangunan, Pemerintah Desa Sindang dirasa perlu membangun badan usaha guna meningkatkan pendapatan asli desa.

Dalam Pasal 72 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. “Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa”. Hasil usaha yang dimaksud dalam Pasal 72 Ayat (1) Huruf a ini salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Tidak hanya dapat digunakan untuk pembangunan, penghasilan atau pendapatan dari BUMDes pun bisa digunakan untuk hal lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan awal dari pembangunan. Hal itu seperti yang dijelaskan dalam Pasal 89 Huruf a dan b Undang-Undang tentang Desa, berturut-turut disebutkan bahwa hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha; dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selain pembangunan fasilitas pengelolaan sampah, pada tahun 2023 ini juga dilakukan pembangunan kantor Bumdes dan agro wisata desa. Juga peningkatan jalan desa di RW 2 dan RW 6 serta pemeliharaan saluran air atau drainase di setiap RW. Selain pembangunan infrastruktur, Pemerintah Desa Sindang juga melakukan pembangunan non fisik seperti pemberdayaan masyarakat dan melakukan pengadaan mobil ambulan sebagai salah satu solusi untuk permasalahan kesehatan masyarakat Desa Sindang.

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa dalam pembangunan tidak bisa lepas dari peran dan strategi komunikasi. Dalam pembangunan, komunikasi adalah unsur yang sangat penting, terutama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Sehingga pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan utama dari pembangunan, yaitu untuk mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera dapat tercapai.

Dalam Undang-Undang tentang Desa Pasal 78 Ayat 2 dikatakan bahwa pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam setiap tahap pembangunan ini harus ada partisipasi dari masyarakat desa. Di Desa Sindang partisipasi masyarakat salah satunya dicerminkan ketika dilakukan perencanaan pembangunan. Dalam melakukan penyusunan perencanaan pembangunan desa, Pemerintah Desa Sindang menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrenbangdes. Kegiatan Musrenbangdes ini diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.

Gambar 5. Musrenbang Desa Sindang



Sumber: Pemerintah Desa Sindang

Gambar di atas menunjukkan kehadiran dan partisipasi masyarakat Desa Sindang dari semua elemen, mulai dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sindang, ketua RT dan RW, karang taruna, ibu-ibu PKK, pengurus Posyandu, unsur LKMD dan LPMD, sampai masyarakat umum dalam Musrenbangdes yang dilakukan pada hari Senin (11/9/2023) di Aula Balai Desa Sindang. Kedatangan masyarakat dalam Musrenbangdes tersebut, terlebih ketika masyarakat desa menyampaikan aspirasinya, merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan.

Dalam setiap kesempatan Musrenbangdes di Desa Sindang, masyarakat diajak untuk turut berpartisipasi oleh Pemerintah Desa Sindang agar arah dan tujuan pembangunan di Desa Sindang dapat terlaksana dan tercapai secara maksimal. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dicerminkan dalam satu contoh tahapan di atas tidak serta merta muncul dari keinginan masyarakat sendiri melainkan berangkat dari komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sindang.

Dengan strategi komunikasi pembangunan yang tepat, partisipasi masyarakat dapat ditumbuhkan dan ditingkatkan seperti menyampaikan ide atau gagasan, kritik, dan masukan atau saran terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan di Desa Sindang. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat Desa Sindang dalam pembangunan sangat penting agar tujuan dari pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercapai secara maksimal. Tanpa partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan, maka pembangunan yang direncanakan tidak akan terlaksana dengan baik dan semestinya.

Namun melalui musyawarah yang mengedepankan partisipasi masyarakat, pembangunan yang direncanakan atau dilaksanakan akan mendapat dukungan. Berdasarkan hal itu, penulis bermaksud dan terdorong untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan strategi komunikasi pembangunan dengan judul “**Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Desa Sindang Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**”.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi komunikasi pembangunan Pemerintah Desa Sindang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang:

1. Strategi komunikasi pembangunan oleh Pemerintah Desa Sindang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Sindang Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.
2. Faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat Desa Sindang dalam pembangunan di Desa Sindang.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan strategi komunikasi pembangunan dalam melaksanakan pembangunan desa, dan bisa menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi tambahan bagi Pemerintah Desa Sindang dalam rangka mengoptimalkan pembangunan desa melalui strategi komunikasi pembangunan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan penjelasan mengenai teori yang mendasari penelitian sekaligus untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan di dalam penelitian. Tinjauan pustaka berguna untuk mengetahui bagaimana pengetahuan yang ada saling terkait dan di mana posisinya. Untuk membantu pembaca memahami penelitian, maka peneliti wajib memberikan ulasan terhadap berbagai macam bahan pustaka yang sama atau berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

II.1 Kerangka Teori

Isi dari sebuah kerangka teori adalah unsur-unsur penelitian terdahulu. Selain itu ada berisi juga teori yang akan digunakan untuk menggambarkan sebuah permasalahan dalam penelitian dan bertujuan untuk mengemukakan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan membatasi ruang lingkup dari penelitian agar tidak meluas atau melebar.

II.1.1 Penelitian Terdahulu

1. Skripsi berjudul Strategi Komunikasi Pembangunan Desa oleh Milda Nur Faizatur Rahma dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (Studi Kasus di Desa Sumari, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik). Penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengidentifikasi strategi dan hambatan komunikasi pembangunan di Desa Sumari Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.

Hasil penelitian ini adalah strategi komunikasi pembangunan sebagai salah satu cara untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, tetapi kendalanya adalah anggaran untuk pembangunan belum mencukupi. Simpulan dari penelitian ini bahwa strategi komunikasi pembangunan desa di Desa Sumari berupa masyawarah desa (Musdes). Persamaan penelitian Milda Nur Faizatur Rahma dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan kajian terhadap konsep strategi komunikasi pembangunan dalam pembangunan desa, sama dalam penggunaan metode penelitian, dan jenis penelitiannya. Sementara perbedaannya terletak pada lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan. Jika Milda melakukan penelitian di Desa Sumari, penelitian ini dilakukan di Desa Sindang.

2. Skripsi Bagus Putra Ramadhan dari Universitas Islam Riau dengan judul Strategi Komunikasi Pembangunan Jembatan di Desa Buluh Cina pada Tahun 2021. Pendekatan dalam skripsi ini adalah dengan pendekatan kualitatif dan berlokasi di Desa Buluh Cina, Kabupaten Kampar. Hasil penelitian ini menunjukkan strategi komunikasi pembangunan telah dijalankan. Dan permasalahan yang ditemui selama penelitian adalah terjadinya pro dan kontra dalam pembangunan jembatan yang dimaksud. Selain itu, permasalahan lain yang menyebabkan belum terealisasinya jembatan permanen di Desa Buluh Cina juga dikarenakan pemerintah desa masih belum bisa memenuhi persyaratan dalam proses pengajuan kepada pemerintah provinsi. Persamaan skripsi Bagus dengan penelitian adalah dalam metode dan objek yang ditelitinya, yakni strategi komunikasi pembangunan. Sedangkan perbedaannya

ada pada lokasi dan waktu penelitian. Selain itu, penelitian Bagus lebih fokus pada satu aspek pembangunan yaitu jembatan. Sedangkan penelitian ini tidak memfokuskan pada satu pembangunan, melainkan pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa dalam kurun waktu tertentu.

3. Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM) Vol. 2 No. 2 (2022), berjudul “Strategi Komunikasi Pembangunan dalam Pengembangan Masjid Al Muhajirin Bumi Asri”. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Yani dkk menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan pengabdian masyarakat untuk mengidentifikasi konsep komunikasi pembangunan diimplementasikan dalam pengembangan masjid mandiri di Masjid Al-Muhajirin Bumi Asri. Simpulan dari penelitian ini adalah strategi komunikasi pembangunan yang digunakan dalam pengembangan masjid mandiri adalah strategi berdasarkan media, strategi pemasaran, dan strategi partisipatori. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah dalam hal meneliti strategi komunikasi pembangunan, metode penelitian dan teknik pengumpulan datanya juga sama. Perbedaannya ada pada bidang pembangunannya yang terfokus pada pengembangan masjid, sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak terpaku pada satu jenis pembangunan. Subjeknya pun berbeda, yaitu jika Indah Yanti melakukan wawancara pada pengurus masjid, penelitian ini mewawancarai pemerintah desa.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Milda Nur Faizatur Rahma dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2020).	Strategi Komunikasi Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Sumari, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik).	Kualitatif; Teknik pengambilan data melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Hasil penelitian ini adalah strategi komuni- si pembangunan sebag- ai salah satu cara untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam kegi- atan pembangunan, tet- api kendalanya adalah anggaran untuk pema- ngunan belum mencuk- upi. Strategi komunika- si pembangunan desa di Desa Sumari berupa masyawarah desa yang dilaksanakan setiap tahun.	Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah berupa lokasi dan waktu penelitian. Milda di Desa Sumari, dan penelitian ini dilakukan di Desa Sindang.	Sama-sama melakukan kajian terhadap konsep strategi komunikasi pembangunan desa; sama-sama menggunakan penggunaan metode penelitian kualitatif.

2.	Bagus Putra Ramadhan (Universitas Islam Riau, 2021).	Strategi Komunikasi Pembangunan Jembatan di Desa Buluh Cina.	Metode Penelitian Kualitatif.	Pemerintah Desa Buluh Cina telah melakukan komunikasi pembangunan dengan baik. Namun masih ada pro dan kontra sehingga pembangunan jembatan belum juga terealisasi. Selain itu, karena pemerintah desa masih belum bisa memenuhi persyaratan kepada Pemprov.	Penelitian oleh Bagus dilakukan pada 2021. Subjeknya Pemerintah Desa Buluh Cina. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 dan subjeknya Pemerintah Desa Sindang.	Kedua penelitian ini sama-sama meneliti konsep strategi komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa.
3.	Indah Yandik	Strategi Komunikasi Pembangunan dalam Pengembangan Masjid Al Muhajirin Bumih Asri.	Metode Penelitian Kualitatif; Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan pengabdian.	Strategi komunikasi pembangunan yang digunakan adalah dengan penggunaan media, pemasaran, dan partisipatori.	Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada subjek penelitian.	Menggunakan metode kualitatif dan meneliti konsep komunikasi pembangunan.

II.1.2 Komunikasi Pembangunan

Menurut Zulkarimen Nasution dalam bukunya yang berjudul *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya* (2002:106), komunikasi pembangunan memiliki pengertian secara luas dan terbatas. Dalam arti luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha melakukan pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai penilaian terhadap hasil pembangunan.

Sedangkan dalam arti yang terbatas, komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara serta teknik penyampaian gagasan dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan yang disampaikan tadi.

Dengan demikian komunikasi pembangunan bisa diartikan sebagai usaha atau proses penyampaian pesan berupa ide atau gagasan tentang pembangunan oleh pemrakarsa pembangunan melalui berbagai saluran agar dapat diterima oleh masyarakat luas. Dari definisi di atas juga bisa kita simpulkan bahwa pada dasarnya, ada minimal tiga komponen yang dilibatkan dalam komunikasi pembangunan. Komponen yang pertama adalah komunikator pembangunan, yakni bisa pemerintah atau masyarakat. Komponen berikutnya adalah pesan-pesan pembangunan seperti

ide, rencana, sampai program pembangunan. Dan komponen ketiga atau yang terakhir adalah masyarakat luas. Dalam hal ini, masyarakat luas tersebut adalah komunikasi pembangunan. Mereka bisa merupakan penduduk desa atau kota yang menjadi sasaran suatu pembangunan.

II.1.2.1 Peran Komunikasi Pembangunan

Dalam suatu pembangunan, komunikasi ternyata memiliki peran yang sangat penting. Melalui komunikasi yang baik di antara semua pihak-pihak yang terlibat pembangunan, maka pembangunan akan berjalan dengan lancar dan berdampak positif bagi masyarakat. Sebab tidak sedikit kasus pembangunan yang dalam prosesnya mengalami kegagalan, terutama dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat, karena kurangnya komunikasi di antara pihak yang terlibat. Berkaitan dengan hal ini, Wilbur Schramm (dalam Nasution, 2002:116-118) merumuskan sejumlah peran pokok komunikasi dalam pembangunan:

1. Menginformasikan Pembangunan

Komunikasi pembangunan berarti menyampaikan pesan atau informasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang terkait dengan pembangunan. Sehingga masyarakat dapat memfokuskan perhatian mereka pada perlunya perubahan, kesempatan dan cara untuk mewujudkan perubahan, sarana perubahan, dan membangkitkan partisipasi dalam pembangunan.

2. Memberi Kesempatan untuk Berpartisipasi Membuat Keputusan

Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, memperluas dialog dengan

melibatkan seluruh pemangku kepentingan atau pembuat keputusan mengenai perubahan, dan memberikan kesempatan kepada para pemimpin atau tokoh masyarakat untuk memimpin serta mendengarkan pendapat masyarakat kecil. Selain itu, membuat arus informasi agar berjalan lancar dari bawah ke atas.

3. Melakukan Edukasi

Komunikasi pembangunan berperan untuk memberi edukasi atau pemahaman tentang rencana atau program-program pembangunan yang akan dilaksanakan kepada seluruh elemen masyarakat, baik orang tua, wanita, atau anak-anak yang bersangkutan, sehingga edukasi tersebut bisa berfungsi dalam pembangunan yang akan dilaksanakan nantinya.

II.1.2.2 Tujuan Komunikasi Pembangunan

Komunikasi pembangunan bertujuan agar dapat tercapai pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan berkeinginan agar sekelompok orang atau masyarakat yang tingkat literasi dan penghasilan serta yang atribut-atribut sosial dan ekonominya rendah untuk berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu pertama-tama kelompok masyarakat tersebut harus menjadi terbuka atau memiliki akses luas terhadap informasi dan mempunyai motivasi untuk menerima, memahami, dan menggunakan secara besar-besaran ide, gagasan dan keterampilan yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya dalam rentang waktu yang lebih singkat dibanding proses yang mereka ambil pada saat keadaan normal atau biasa (Nora C. Quebral dalam Harun dan Ardianto, 2012:162).

Tujuan dari pembangunan memang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun hal ini tidak berarti bahwa pembangunan harus berhenti begitu kesejahteraan masyarakat sudah mencapai tingkatan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai melalui pembangunan adalah sesuatu yang harus dirumuskan secara kongkret, diperhitungkan secara logis, dan dapat dimanifestasikan dengan instrumen serta berbagai sumber daya yang tersedia dan didirikan sebagai keinginan antara keadaan saat ini dengan tujuan akhir dari pembangunan.

II.1.2.3 Unsur-unsur Komunikasi Pembangunan

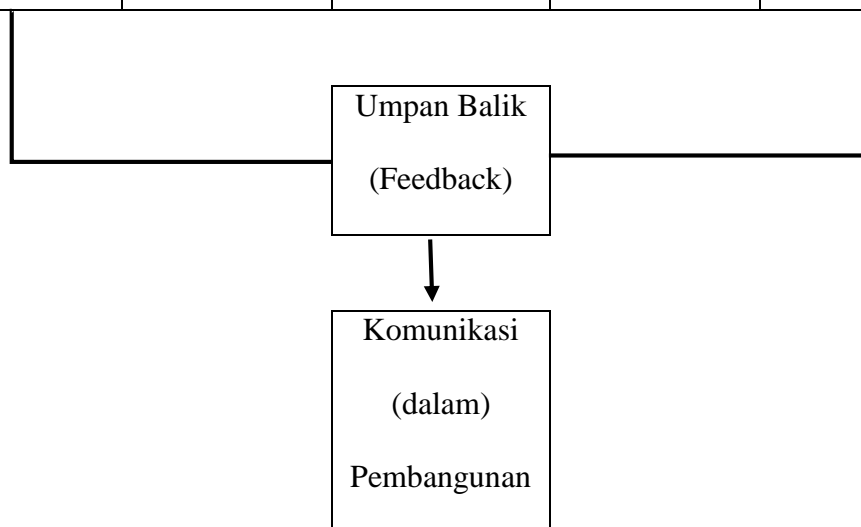
Secara umum unsur-unsur dalam komunikasi pembangunan juga sama dengan unsur-unsur yang ada dalam komunikasi lainnya. Namun dalam komunikasi pembangunan, pesan-pesan atau informasi yang dikirimkan oleh komunikator lebih bersifat universal atau tujuannya untuk masyarakat luas. Komunikasi pembangunan bisa dilakukan dengan berbagai cara atau saluran, mulai dari komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, sampai komunikasi massa untuk menginformasikan, menyebarluaskan informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan program-program pembangunan.

Menurut Andi Kardian Riva'i dalam bukunya yang berjudul *Komunikasi Sosial Pembangunan Tinjauan Komunikasi dalam Pembangunan Sosial* (2016:10-11), dalam komunikasi pembangunan terdapat lima unsur-unsur dasar. Di antara beberapa unsur dasar tersebut yang disebut komunikator dalam komunikasi pembangunan adalah mereka, seseorang atau sekelompok orang, yang memprakarsai pembangunan. Pemrakarsa atau komunikator pembangunan dalam

hal ini adalah mereka yang memiliki inisiatif untuk melakukan pembangunan, bisa pihak pemerintah atau pihak masyarakat sendiri. Saluran yang digunakan dalam komunikasi pembangunan menurut Rivai'i adalah komunikasi antar personal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Sedangkan komunikasi dalam komunikasi pembangunan adalah masyarakat luas.

Tabel 2. Unsur-unsur Komunikasi Pembangunan menurut Riva'i

Komunikator (Source)	Pesan (Messenger)	Saluran (Chanel)	Komunikan (Receiver)	Dampak (Effect)
Pemrakarsa: Inisiator, Kreator (Pemerintah dan Masyarakat)	Strategi dan Perencanaan Komunikasi: Ide, Program	Komunikasi Antarpersonal, Komunikasi Kelompok, Komunikasi Massa	Sasaran: Masyarakat Luas	Perubahan: Difusi dan Inovasi



II.1.2.3.1 Komunikator

Untuk menumbuhkan partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam setiap proses pembangunan, dibutuhkan unsur yang bisa menggerakkan dan memandu kecakapan masyarakat untuk memanifestasikan cita-cita pembangunan. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai komunikator dan merupakan sumber utama dalam komunikasi pembangunan. Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan dan melaksanakan pembangunan, sehingga dituntut untuk mampu memikul tugas-tugas pembangunan yang multidimensi. Oleh karenanya, kesuksesan dalam melakukan pembangunan di suatu daerah sangat bergantung pada kualitas dan kinerja pemerintahnya.

II.1.2.3.2 Pesan

Dalam proses komunikasi, pesan adalah suatu bentuk gagasan, pemikiran, atau informasi yang akan diampaikan oleh komunikator kepada si penerima pesan atau komunikan dengan menggunakan media atau saluran tertentu sehingga mengakibatkan dampak yang diinginkan oleh pengirim pesan. Sementara dalam konteks komunikasi pembangunan ini, menurut Riva'i (2016:10), pesan-pesan dalam komunikasi pembangunan tidak hanya menyasar pada satu orang atau sekelompok orang tertentu saja. Pesan dalam komunikasi pembangunan lebih bersifat universal atau ditujukan kepada masyarakat luas dengan berbagai metode atau saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan tersebut. Adapun saluran dalam komunikasi pembangunan adalah saluran komunikasi antar pribadi, saluran komunikasi kelompok, hingga saluran komunikasi massa.

II.1.2.3.3 Saluran Komunikasi Pembangunan

Dalam pembangunan, komunikasi berfungsi untuk memperlancar arus informasi pembangunan atau sebagai aktivitas saling bertukar pesan di antara para pemangku kepentingan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap evaluasi pembangunan. Komunikasi pembangunan adalah segala cara atau metode untuk menyampaikan pesan dan keterampilan atau keahlian pembangunan dari pemrakarsa pembangunan kepada masyarakat luas yang bertujuan agar masyarakat bisa menerima, memahami, dan kemudian bisa ikut serta atau berpartisipasi dalam pembangunan.

Komunikasi dalam pembangunan sangat penting agar pembangunan terlaksana dengan baik. Oleh karena pentingnya komunikasi dalam pembangunan, maka sangat diperlukan relevansi dengan teori-teori komunikasi yang digunakan. Dalam hal ini, teori komunikasi yang relevan dalam komunikasi pembangunan adalah komunikasi antarpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Ketiga teori komunikasi tersebut untuk menjawab berbagai persoalan dalam pembangunan.

a. Komunikasi antar pribadi

Menurut Riva'i (2016:63), komunikasi antar pribadi terjadi dalam bentuk komunikasi khusus di antara individu atau personal yang respon verbal atau non verbalnya terjadi secara langsung dan dalam jarak dekat. Dengan kata lain, kedua belah pihak yang saling berkomunikasi mengirim dan menerima pesan secara langsung dan bersamaan.

b. Komunikasi kelompok

Komunikasi kelompok adalah interaksi pribadi atau dilakukan secara tatap muka di antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, melindungi diri, memecahkan permasalahan, dimana para anggotanya bisa dengan mudah mengingat karakteristik pribadi anggota yang lain dengan tepat (Michael Burgoon dalam Riva'i, 2016:68).

c. Komunikasi massa

Oleh Rivai'i (2016:82), komunikasi massa didefinisikan sebagai suatu jenis komunikasi yang berlangsung dalam suatu organisasi dan menyasar khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim sehingga pesan yang bersifat umum dapat sampai di waktu yang bersamaan dan untuk sementara.

II.1.2.3.4 Komunikasikan

Setiap tahap pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dari hasil pembangunan itu harus berfokus ke bawah dan mengikutsertakan masyarakat luas. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan wewenang untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan kepada masyarakat. Dengan demikian, pembangunan yang terjadi diharapkan bisa lebih ditingkatkan dan mempertimbangkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat luas agar dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat sendiri. Dalam hal ini, komunikasi dalam komunikasi pembangunan adalah masyarakat luas yang dituntut untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan mulai dalam perencanaannya, pelaksanaannya, hingga evaluasi pembangunannya.

II.1.2.3.5 Dampak (*effect*) Komunikasi Pembangunan

Dalam komunikasi maupun pembangunan, keberadaan sebuah dampak atau akibat dari proses atau kegiatan dari keduanya tidak bisa dibantahkan. Sedikitnya ada tiga bentuk dampak yang ditimbulkan oleh proses atau kegiatan komunikasi maupun pembangunan, yaitu antara lain dampak *kognitif* (pengetahuan), *afektif* (emosional atau perasaan), dan dampak yang bersifat *konatif* (tingkah laku). Munculnya dampak atau efek ditinjau dari perspektif kekinian tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan satu sama lain yang ikut memengaruhi proses penerimaan pesan dan menjadi efek penentu yang dihasilkan dari proses komunikasi secara umum.

Berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari komunikasi pembangunan, Andi Kardian Riva'i (2016:36) mengategorikannya menjadi empat jenis, yaitu:

1. Dampak positif, adalah dampak yang dipandang baik oleh inisiator atau pemrakarsa pembangunan dan orang atau pihak lain.
2. Dampak negatif, adalah dampak yang tidak diinginkan oleh penyelenggara pembangunan maupun pihak lain.
3. Dampak yang disadari (*intended consequences*), yaitu dampak yang diketahui terjadi atau dicapai dan direncanakan oleh penyelenggara pembangunan.

4. Dampak yang tidak disadari (*unintended consequences*), yaitu akibat yang tidak diketahui atau tidak diinginkan kemunculannya karena tidak direncanakan oleh penyelenggara pembangunan.

II.2 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan unsur penelitian yang membahas tentang kekhususan masalah yang hendak diteliti. Kerlinger (dalam Kriyantono, 2016:17) mengatakan bahwa konsep adalah satu hal yang abstrak dan dibentuk dengan mengeneralisasikan hal-hal yang bersifat khusus. Jadi yang dimaksud dengan konsep adalah sejumlah karakteristik umum suatu objek. Sedangkan menurut Hamidi (2010:141), definisi konsep adalah memberi batasan pada pemahaman yang diberikan peneliti terhadap konsep yang akan diukur, diteliti, dan digali datanya.

II.2.1 Definisi Komunikasi

Banyak ahli telah mendefinisikan apa itu komunikasi, baik secara etimologi maupun terminologi. Secara etimologi menurut Siti Roskina dan Ikhfan Haris (2020:7), istilah komunikasi bermula dari bahasa latin yaitu *communicatus* yang artinya berbagi atau menjadi milik bersama. Komunikasi merujuk pada usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kebersamaan atau dapat juga diartikan sebagai proses berbagi di antara pelaku-pelaku yang terlibat dalam komunikasi itu. Pengertian lain dari komunikasi adalah proses pertukaran informasi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lainnya melalui suatu sistem simbol, tanda-tanda, atau tindakan.

Sedangkan Lasswell (dalam Roskina dan Haris, 2020:7-8) mengatakan bahwa komunikasi pada dasarnya adalah proses yang mengartikan siapa? mengatakan apa? dengan saluran apa? kepada siapa? dengan akibat atau hasil apa? Pengertian komunikasi dari Laswell ini secara jelas dan kronologis menggambarkan tentang lima unsur yang ada di dalam proses komunikasi dan menunjukkan bahwa komunikasi merupakan usaha yang disengaja dan dilakukan karena ada tujuan tertentu dari pihak-pihak yang melakukan komunikasi.

Adapun lima komponen komunikasi menurut Laswell tersebut yaitu siapa (pelaku komunikasi pertama yang berinisiatif atau sumber), apa yang disampaikan (isi informasi yang dikirimkan), kepada siapa (pelaku komunikasi lain yang menjadi penerima pesan), melalui saluran apa (alat/saluran pertukaran informasi), dan dengan dampak seperti apa (dampak yang diinginkan terjadi dalam diri penerima).

Dengan demikian, komunikasi menurut Lasswell adalah proses penyampaian ide, gagasan atau informasi dari komunikator atau pemberi pesan kepada komunikan alias si penerima pesan dengan menggunakan saluran tertentu. Proses ini bisa dilakukan dengan tatap muka atau secara langsung maupun tidak secara langsung (menggunakan media tertentu) dengan maksud memberi dampak kepada penerima pesa atau komunikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikator atau si pemberi pesan. Artinya dalam prosesnya, komunikasi yang terjadi atau yang dilakukan itu harus memenuhi lima unsur, yakni: *who, says what, in which channel, to whom, whit what effect.*

Berikut analisis lima unsur dalam komunikasi menurut Laswell:

1. Who? (siapa/sumber)

Sumber adalah komunikator atau pelaku atau pihak utama yang membutuhkan atau memprakarsai komunikasi dengan pihak lain. Komunikator atau pemrakarsa komunikasi ini dapat berupa pribadi individu, sekelompok orang, organisasi, atau bahkan negara.

2. Says What? (pesan)

Isi informasi seperti apa yang hendak dikatakan oleh komunikator kepada penerima pesan atau komunikan. Pesan adalah seperangkat simbol verbal dan non verbal yang mewakili perasaan, nilai dan gagasan dari sumber pesan. Terdapat tiga komponen pesan: makna, simbol yang digunakan untuk menyampaikan makna, dan bentuk pesan.

3. In Which Chanel? (saluran/media)

Merupakan sarana yang digunakan oleh komunikator untuk mengirimkan pesan kepada komunikan, baik dilakukan dengan langsung (dengan tatap muka) atau tidak langsung (melalui media cetak/elektronik dll).

4. To Whom? (untuk siapa/penerima)

Orang atau sekelompok orang yang menerima pesan dari komunikator. Disebut juga sebagai komunikan.

5. What Effect? (dampak/efek)

Adalah dampak yang ditimbulkan dan diharapkan terjadi pada diri penerima pesan atau komunikan setelah menerima pesan dari komunikator seperti bertambahnya pengetahuan, perubahan sikap dan lain sebagainya.

II.2.2 Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi adalah panduan rencana komunikasi untuk menggapai tujuan. Dengan demikian strategi komunikasi harus bisa menunjukkan seperti apa strategi tersebut dilakukan dengan taktis. Strategi adalah sebuah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, serta pengevaluasian. Menurut Alo Liliweri (2011:240), yang dimaksud dengan strategi komunikasi adalah sebagai berikut:

1. Strategi mengartikulasikan, menjelaskan, dan mempromosikan suatu visi komunikasi dan satuan tujuan komunikasi dalam suatu rumusan yang baik.
2. Strategi untuk menghasilkan komunikasi yang konstan dan dilaksanakan berdasar pada satu pilihan atau keputusan dari sejumlah opsi komunikasi.
3. Strategi komunikasi menjelaskan tahapan konkret dalam rangkaian aktivitas komunikasi yang berbasis pada satuan teknik bagi pengimplementasian tujuan komunikasi.
4. Adalah tujuan akhir komunikasi, strategi berperan memfasilitasi perubahan perilaku untuk mencapai tujuan komunikasi manajemen. (Bank Dunia, 2001).

Karena itu, menurut Liliweri, strategi komunikasi selalu dihubungkan dengan:

1. Siapa yang bicara.
2. Maksud apa saya bicara.
3. Pesan apa yang harus disampaikan kepada seseorang.
4. Cara bagaimana saya menyampaikan pesan kepada seseorang.
5. Bagaimana mengukur dampak pesan tersebut.

Sementara menurut *Academy for Educational Development* AED dalam Nasution (2002:164), ada empat strategi komunikasi pembangunan yang biasa digunakan selama ini:

1. Strategi Berdasarkan Media

Sumber atau komunikator yang memakai strategi ini biasanya mengadakan kegiatan-kegiatan di sekitar media tertentu yang disenangi. Secara umum, pengguna dari strategi media ini biasanya memulai rencana mereka dengan menanyakan “Apa yang bisa saya lakukan dengan menggunakan televisi, radio?” dan lain sebagainya.

2. Strategi Desain Intruksional

Pengguna strategi ini biasanya adalah para pendidik yang memusatkan strategi mereka pada pembelajaran terhadap sejumlah individu untuk dijadikan sebagai sasaran atau target utama mereka. Strategi ini didasarkan pada teori pembelajaran atau pendidikan formal dan berfokus pada pendekatan sistem terhadap pengembangan materi pembelajaran.

3. Strategi Partisipatori

Dalam strategi ini, prinsip utama dalam penyelenggaraan sebuah kegiatan adalah kerjasama komunitas dan pertumbuhan pribadi (*community participation and personal growth*). Dengan kata lain, yang penting dalam strategi ini bukanlah seberapa banyak pesan atau pengetahuan yang orang-orang pelajari melalui program komunikasi pembangunan, tapi lebih pada pengalaman dan keikutsertaan sebagai seseorang yang sederajat dalam proses berbagi pengetahuan atau keterampilan.

4. Strategi Pemasaran

Strategi ini tumbuh sebagai suatu strategi komunikasi yang sifatnya paling langsung dan terasa biasa. Prinsip pemasaran sosial menjadi dasar dari strategi ini.

II.2.3 Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah suatu usaha dari pemerintah dan masyarakat desa yang dilakukan dengan sadar dan terencana berdasarkan prakarsa dari masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal dan partisipasi masyarakat desa untuk menuju perubahan ke kondisi yang lebih baik dari sebelumnya, yaitu meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat desa. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UU Desa Pasal 11 Ayat 8, pembangunan desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan kata lain, pembangunan desa memiliki tujuan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan dari masyarakat dan kualitas hidup mereka serta untuk menanggulangi tingkat kemiskinan di desa melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pembangunan sarana dan prasarana desa, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa sebagaimana amanat undang-undang bahwa Kepala Desa memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, melakukan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara perencanaan pembangunan desa dilakukan

melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan hasilnya akan dijadikan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk selanjutnya dilakukan penetapan APBDDes. Dalam melaksanakan pembangunan, Kepala Desa tidak sendirian melainkan dibantu oleh perangkat dan oleh lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

II.2.4 Partisipasi Masyarakat

Menurut Riva'i (2016:28), partisipasi masyarakat secara harfiah adalah turut berperan atau ikut serta dalam sebuah kegiatan. Secara luas, partisipasi diartikan sebagai bentuk keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dan sukarela karena sebuah alasan tertentu yang berasal dari dalam diri mereka sendiri atau dari luar diri mereka dalam seluruh proses kegiatan yang dimaksudkan. Partisipasi dari masyarakat dalam sebuah pembangunan adalah faktor utama sekaligus indikator keberhasilan pembangunan.

Sebesar apa pun upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pembangunan, jika tidak melibatkan dan menumbuhkan daya dukung dari masyarakat, maka dalam proses atau setiap tahapannya, pembangunan yang dilakukan akan mengalami hambatan dan bahkan kegagalan. Terlebih pembangunan yang dilakukan pasti tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

II.2.4.1 Pembangunan Partisipatif

Melibatkan masyarakat dalam pembangunan merupakan sebuah keharusan. Dengan mengikutsertakan secara langsung masyarakat dalam pembangunan, akan menghasilkan dampak yang begitu penting seperti terhindar dari manipulasi,

memberi nilai tambah dan legitimasi dari rumusan rencana pembangunan karena tidak sedikit yang terlibat, dan dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat. Dalam Rivai'i (2016:29) dikatakan ada tiga jalur aspirasi masyarakat dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah, yaitu:

- a. Jalur musyawarah rencana pembangunan yang mana masyarakat bisa menyampaikan aspirasi dengan langsung sesuai tingkatannya.
- b. Jalur politik atau melalui partai politik. Biasanya dilakukan oleh anggota dewan saat masa reses.
- c. Jalur birokrasi, yang dapat diutarakan secara langsung kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) atau melalui kepala daerah.

Sementara menurut sistem dan mekanismenya, Cohen dan Uphof (Rivai'i, 2016:30-32) mengategorikan partisipasi menjadi empat jenis seperti berikut:

- a. *Participation in decision making.*

Merupakan partisipasi masyarakat dalam pembuatan atau pengambilan keputusan dan kebijakan. Partisipasi dalam bentuk ini adalah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengatakan kebutuhan atau keinginan mereka dan menilai rencana atau program yang dilaksanakan. Masyarakat pun mempunyai kesempatan untuk melakukan evaluasi terhadap suatu keputusan atau kebijakan yang sedang berjalan. Partisipasi dalam pengambilan keputusan ini adalah proses dimana prioritas-prioritas pembangunan dipilih dan dituangkan dalam bentuk program yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dengan melibatkan

masyarakat, maka secara tidak langsung mereka bisa mengalami dan melatih diri untuk menentukan masa depannya sendiri secara demokratis.

b. *Participation in implementation*

Merupakan keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat (partisipasi) dalam pelaksanaan pembangunan yang sebelumnya telah dilaksanakan. Dalam hal ini, bentuk partisipasi bisa ditinjau dari seberapa banyak yang aktif dalam partisipasi dengan berbagai bentuk seperti bahan, uang, tenaga, sebagian atau semuanya, secara langsung atau tidak, sekali atau berulang kali.

c. *Participation in benefits*

Merupakan partisipasi dalam bentuk memanfaatkan atau menikmati hasil pembangunan. Bentuk partisipasi ini seperti pemerataan kesejahteraan dan fasilitas, meratanya usaha dan pendapatan, sampai turut menggunakan hasil pembangunan seperti jalan raya, jembatan, air minum dan berbagai sarana prasarana lainnya. Partisipasi dalam bentuk memanfaatkan atau menikmati hasil pembangunan ini juga bisa dalam bentuk meningkatkan pembangunan berikutnya atau dalam memelihara dan merawat hasil-hasil pembangunan.

d. *Participation in evaluation.*

Merupakan partisipasi dalam bentuk menilai dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan hasilnya. Partisipasi penilaian ini bisa dilakukan secara langsung, seperti dengan terlibat dalam pengawasan dan penilaian atau tidak langsung, misalnya dengan memberikan saran-saran, masukan, kritikan, hingga dengan memprotes pembangunan.

II.2.4.2 Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Partisipasi atau keterlibatan masyarakat akan terhambat, berkurang, atau bahkan tidak terjadi sama sekali karena disebabkan oleh beberapa alasan. Beberapa alasan tersebut seperti kesalahan dalam memahami partisipasi masyarakat, agen pembangunan yang tidak cukup terlatih, hingga agen pembangunan yang seringkali mengorbankan kepentingan umum. Berikut sejumlah alasan kenapa partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi terhambat sebagaimana dikemukakan oleh Caayupan R.B dalam Guzman P.L (dalam Riva'i, 2016:34-35):

- a. Kesalahan atau keliru dalam memahami partisipasi masyarakat. Hal ini misalnya seperti mengagap bahwa masyarakat tidak bisa berpartisipasi dengan efisien karena kurangnya keahlian atau kemampuan.
- b. Minim dan tidak adanya strategi lain yang efektif dan bisa menumbuhkan partisipasi, padahal sudah menjadi satu dalam program pembangunan.
- c. Agen pembangunan tidak cukup terlatih dalam hal konsep, metode, dan tekniknya untuk menumbuhkan partisipasi dalam pembangunan.
- d. Tidak sedikitnya lembaga pemerintah yang datang dan menawarkan paket pembangunan kepada pihak yang sama.
- e. Organisasi berorientasi perdesaan yang tumbuh bagai jamur, merupakan inisiatif pemerintah dan banyak membebani atau memaksakan kehendaknya pada masyarakat.
- f. Organisasi atau lembaga lokal tidak digunakan dan dikembangkan mekanisme partisipasinya tetapi malahan mengambil manfaat dari paket pembangunan *top to bottom*.

- g. Sebagai akibat langsung dari struktur kekuasaan yang ada di daerah perdesaan yang hanya melayani sebagian besar kebutuhan masyarakat kelompok elit.
- h. Agen pembangunan pada mesin birokratis seringkali memasukkan dan mengorbankan kepentingan partisipasi masyarakat dalam rangka mengejar hasil dan prestasi.

II.2.5 Pemerintah Desa

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat 2, 3, dan 4 berturut-turut dikatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sementara Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Berikut ini susunan pemerintahan desa beserta tugas dan fungsinya:

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah orang yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa secara demokratis. Kepala desa adalah pemimpin atau kepala pemerintahan di tingkat desa dan pelopor pembangunan di desa. Kepala desa memiliki tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, melakukan pembangunan, dan melakukan pembinaan serta pemberdayaan kepada

masyarakat desa. Selain itu, kepala desa juga berkewajiban pada pengembangan ekonomi masyarakat, potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam, pelestarian lingkungan hidup desa, dan menyampaikan informasi kepada seluas-luasnya masyarakat desa. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan di desa, berarti kepala desa dan jajarannya wajib memberikan transparansi tentang rencana hingga pelaksanaan pembangunan di desa kepada seluruh masyarakat desa.

2. Perangkat Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di Pasal 48 disebutkan bahwa perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Sementara dalam pasal selanjutnya, dijelaskan bahwa perangkat desa bertugas membantu dan bertanggungjawab kepada kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan kata lain, perangkat desa adalah mereka yang memiliki tugas untuk membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD merupakan lembaga yang terdiri dari unsur perwakilan masyarakat berdasarkan kewilayahan, dan penetapannya dilakukan secara demokratis. BPD berfungsi untuk membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama kepala desa. Selain itu BPD memiliki fungsi untuk menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat desa dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah desa, serta melakukan pemantauan terhadap kinerja dari pemerintah desa.

II.3 Pokok-pokok Penelitian

Agar dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dari maksud yang sudah direncanakan, atau semakin meluasnya masalah yang dibahas dalam penelitian, maka diperlukan adanya suatu fokus permasalahan dalam penelitian sehingga bisa memudahkan dalam memperoleh data dan keterangan yang dibutuhkan. Berdasarkan hal itu penulis menetapkan sebuah batasan, yaitu:

a. Subjek Penelitian

Adalah pihak-pihak yang menjadi sumber data penelitian dan dipilih berdasarkan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dan tujuan dari penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah Pemerintah Desa Sindang dan masyarakat Desa Sindang.

b. Objek Penelitian

Sedangkan objek adalah masalah yang dijadikan sebagai pokok penelitian. Dalam hal ini, objek penelitiannya adalah komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sindang.

II. 4 Alur Pikir Penelitian

Di dalam penelitian, yang dimaksud dengan alu pikir merupakan sebuah gambaran, rancangan, atau konsep bagaimana penelitian dilakukan dan berkaitan dengan rumusan masalah, dasar teori, metode penelitian, dan hasil akhir penelitian. Alur pikir menampilkan sebuah bagan yang menggambarkan operasionalisasi konsep berbentuk poin-poin penelitian yang menjadi unit analisis.

Dalam penelitian ini, ada tiga bahasan utama yang berkaitan dengan strategi komunikasi pembangunan Pemerintah Desa Sindang dalam pembangunan di Desa Sindang Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal yaitu penyelenggara pemerintahan di Desa Sindang sebagai penanggung jawab pembangunan, strategi komunikasi apa yang digunakan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ketiga poin ini menjadi bahasan utama dalam penelitian ini karena kesuksesan pembangunan tidak lepas dari peran pemerintah, strategi komunikasi pembangunan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tabel 3. Alur Pikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian dan tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Hikmat (2011:37-38 dalam Kiki Novriansyah, 2019:42) metode kualitatif adalah prosedur dalam penelitian untuk memperoleh data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan atau perilaku dari orang-orang yang dapat diamati. Metode ini digunakan karena sejumlah pertimbangan: Pertama, ketika berhadapan dengan kenyataan ganda, menyesuaikan metode kualitatif bisa lebih mudah. Kedua, metode ini secara langsung mewakili sifat atau hakikat hubungan peneliti-responden, dan ketiga adalah karena lebih peka dan mampu beradaptasi terhadap banyak pengaruh dan nilai-nilai yang dihadapi. Penelitian kualitatif merencanakan desain yang secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Dengan kata lain, penelitian ini tidaklah mesti menggunakan gambaran yang telah disusun dengan ketat atau kaku atau tidak dapat diubah.

Sementara Krisyantono (2007:7 dalam Kiki Novriansyah, 2019:43), mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pernyataan-pernyataan dan data yang sifatnya hanya menggolongkan. Berdasarkan pengertian tentang kualitatif di atas, bisa disimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan pengamatan manusia dan faktor lainnya, serta manusia-manusia yang berada di

lingkungan tersebut untuk memperoleh data yang sifatnya menggambarkan sesuatu dengan seadanya, yakni berupa pernyataan lisan atau tertulis.

III.2 Jenis dan Sumber Data

Menurut Bungin (2007:122 dalam Naufal Mifdhal, 2020:38), dalam proses mencari data, ada sejumlah metode yang biasa digunakan sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Pertama adalah data primer atau data yang didapatkan langsung dari sumber utama atau pertama di tempat penelitian. Data primer ini dapat berupa tanggapan informan dan tentang data-data atau informasi yang dibutuhkan. Alasan peneliti menggunakan data primer karena penelitian dilakukan dengan cara observasi atau turun ke lapangan dan melakukan tanya jawab (wawancara) terhadap informan penelitian yang ditetapkan.

2. Data Sekunder

Kedua adalah data sekunder. Menurut Sutopo (2006:56), data sekunder adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen sebelumnya. Sumber dari data sekunder ini bisa merupakan buku, internet, jurnal, skripsi dan makalah atau sumber lain yang peneliti anggap bisa menunjang penelitian.

III.3 Informan Penelitian

Menurut Moleong (2012:132), informan adalah individu atau orang yang dapat memberikan informasi mengenai sebuah situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan dalam penelitian umumnya adalah seseorang atau sekelompok

orang yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan wawasan tentang topik penelitian yang sedang digali dan bisa memberikan informasi kepada peneliti sebagai bagian dari proses penelitian. Informan seringkali dipilih berdasarkan keahlian atau pengalaman dalam bidang yang terkait dengan topik penelitian. Jenis informan penelitian dapat dibagi menjadi:

1. Informan kunci atau informan yang memiliki posisi atau peran tidak tergantikan alias paling penting dalam proses penggalan data. Dengan kata lain, orang yang menjadi informan kunci tidak bisa diganti oleh siapapun.
2. Informan utama adalah seseorang atau sekelompok orang yang bisa memberi penjelasan tentang topik penelitian yang sedang diteliti.
3. Informan pendukung atau tambahan, yaitu informan yang diperlukan untuk menambah data penelitian. Informan pendukung juga bisa merupakan seseorang atau sekelompok orang.

III.3.1 Profil Informan

Berikut ini peneliti sajikan profil para informan penelitian dalam penelitian ini, mulai dari informan kunci, utama, hingga pendukung:

a. Informan Kunci

Nama : Rusdi Hadi
Alamat : Desa Sindang, RT 2/1
Jabatan : Kepala Desa Sindang (2019-2025)

Informan kunci pada penelitian ini adalah Kepala Desa Sindang, Rusdi Hadi. Selaku informan kunci, Rusdi Hadi tidak bisa diganti oleh siapa pun.

b. Informan Utama

Nama : Sutikno
 Tempat dan Tanggal Lahir : Tegal, 28 Februari 1982
 Alamat : Desa Sindang, RT 2/1
 Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 Sindang

c. Informan Pendukung 1

Nama : Mahmuji
 Tempat dan Tanggal Lahir : Tegal, 10 Oktober 1985
 Alamat : Desa Sindang, RT 1/3
 Jabatan : Ketua RT 1 RW 3 (Tokoh pemuda)

d. Informan Pendukung 2

Nama : Widiarti
 Tempat dan Tanggal Lahir : Tegal, 27 Desember 1980
 Alamat : Desa Sindang, RT 4/4
 Jabatan : Masyarakat (Perwakilan perempuan)

Tabel 4. Profil Informan

NO	Nama	Jabatan	Informan
1.	Rusdi Hadi	Kepala Desa Sindang	Informan Kunci
2.	Sutikno	Ketua BPD Sindang	Informan Utama
3.	Mahmuji	Ketua RT 1 RW 2	Informan Pendukung
4.	Widiarti	Masyarakat	Informan Pendukung

III.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data adalah cara-cara yang digunakan oleh penulis atau peneliti untuk menghimpun data. Dalam penelitian ini, digunakan sejumlah cara mengumpulkan data seperti berikut:

1. Wawancara

Menurut Kiki Novriansyah (2019:43), yang dimaksud dengan wawancara adalah cara seseorang yang ingin mendapat informasi dari orang lain dengan jalan mengajukan pertanyaan dengan maksud memperoleh jawaban yang diinginkan. Secara umum, ada dua tipe dalam wawancara, yaitu wawancara yang dilakukan dengan terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara yang tidak terstruktur biasa disebut dengan wawancara mendalam, wawancara intensif, dan terbuka. Sedangkan wawancara terstruktur biasa disebut dengan wawancara baku yang pertanyaannya sudah disiapkan terlebih dahulu dan ada pilihan-pilihan jawabannya.

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik atau cara dalam menganalisa dan mencatat secara sistematis tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dengan melihat atau mengamatinya secara langsung. Menurut Ghony dan Almansur (2014:165 dalam Kiki Novriansyah, 2019:47), metode observasi adalah salah satu metode mengumpulkan data yang mewajibkan peneliti untuk terjun ke tempat penelitian atau lapangan guna mengamati sejumlah hal yang ada kaitannya dengan ruang, waktu, peristiwa, tujuan, dan sampai perasaan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber resmi dan tidak resmi. Sumber resmi adalah dokumentasi dari sebuah lembaga resmi atau perorangan dengan mengatas namakan lembaga. Sedangkan sumber tidak resmi dibuat atau dikeluarkan oleh perorangan dengan tidak mengatas namakan lembaga. Dokumen yang bakal dijadikan sebagai sumber referensi bisa merupakan artikel di media massa dan internet.

III.5 Teknik dan Analisis Data

Metode analisa data pada penelitian ini menggunakan model interaktif. Analisa teknik interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:246 dalam Naufal Mifdhal, 2020:42) adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang penting, dengan mencari tema dan polanya. Dengan kata lain, mereduksi data akan memberikan gambaran yang semakin terang. Untuk itu diperlukan kecerdasan dan keluasan wawasan.

2. Penyajian Data

Setelah reduksi data, maka tahap berikutnya adalah dengan menyajikan data tersebut. Tahap penyajian data ini dilakukan untuk memudahkan pekerjaan penelitian selanjutnya berdasarkan apa yang sudah diketahui, yakni melakukan penarikan simpulan.

3. Penarikan Simpulan

Proses terakhir adalah dengan menarik simpulan dan melakukan verifikasi.

Peneliti diharuskan mencari bukti yang kuat untuk mendukung dan menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan.

III.6 Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini:

BAB I berisi pendahuluan. Bagian ini terdiri dari latar belakang, tujuan, hingga manfaat penelitian.

BAB II berisi tinjauan pustaka, membahas teori yang digunakan atau mendukung penelitian. Di dalamnya juga terdapat definisi konsep yang menjadi dasar penelitian.

BAB III berisi metode penelitian yang digunakan. Bab ini juga menjelaskan jenis dan tipe penelitian, jenis sumber data, hingga sistematika penulisan.

BAB IV berisi deskripsi wilayah, tempat dilakukannya penelitian.

BAB V berisi hasil penelitian yang didapat saat melakukan penelitian dengan menyesuaikan instrumen yang digunakan dalam penelitian.

BAB VI berisi pembahasan dari apa yang peneliti temukan saat melakukan penelitian.

BAB VII berisi penutup dan simpulan yang ditarik dari hasil penelitian, serta rekomendasi terkait penelitian.

BAB IV

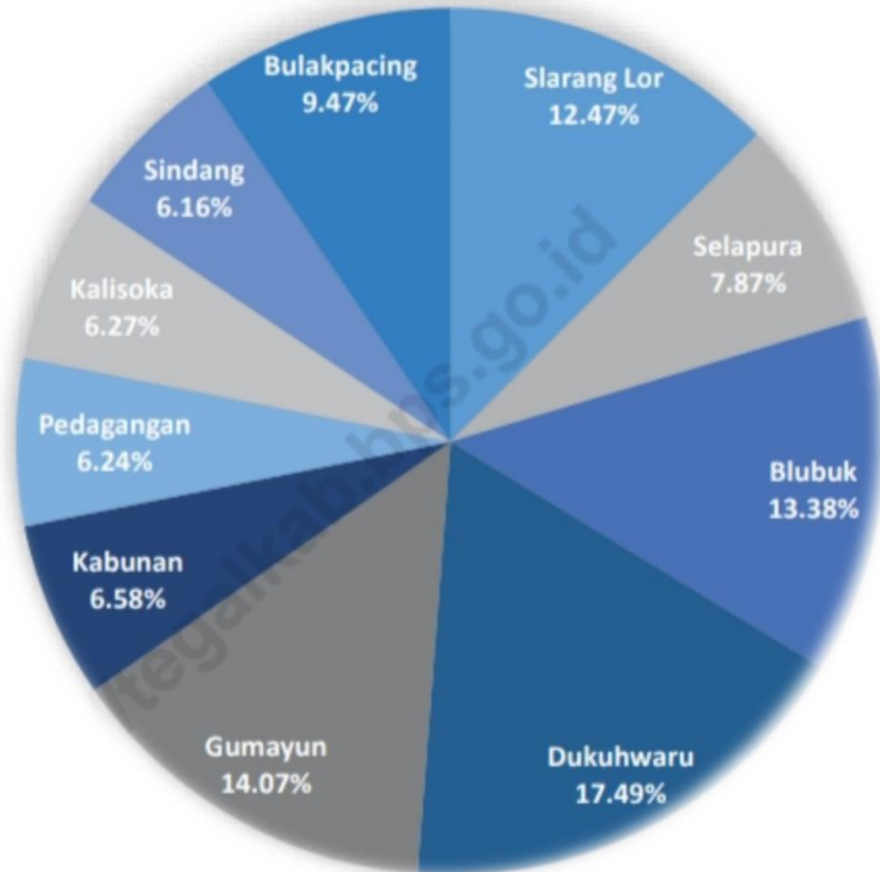
DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Tegal adalah salah satu kabupaten di Jateng dengan ibukota di Slawi. Luas wilayah Kabupaten Tegal sebesar 983,9 km persegi dan terdiri dari 18 kecamatan dengan 287 desa/kelurahan. Salah satu desa di Kabupaten Tegal adalah Desa Sindang. Desa ini termasuk salah satu dari sepuluh desa yang ada di Kecamatan Dukuhwaru. Secara astronomis, Desa Sindang terletak di antara 109,06'14" bujur timur dan 6,57'34" lintang selatan. Sementara berdasarkan posisi geografisnya, Desa Sindang berbatasan langsung dengan Desa Kalisoka di sebelah timur; dengan Desa Pagiyanen di sebelah utara; dengan Desa Gumayun di sebelah selatan; dan dengan Desa Dukuhwaru di sebelah barat.

Berdasarkan data dari buku *Kecamatan Dukuhwaru dalam Angka 2023*, luas wilayah Desa Sindang sebesar 1,62 km persegi atau sekitar enam persen dari luas keseluruhan wilayah Kecamatan Dukuhwaru. Jika dibandingkan dengan desa lain yang ada di Kecamatan Dukuhwaru, luas wilayah Desa Sindang adalah yang paling kecil. Sedangkan desa dengan luas wilayah paling besar adalah Desa Dukuhwaru atau ibukota kecamatan sendiri. Sementara secara administratif, Desa Sindang terdiri dari enam Rukun Warga (RW) dan 24 Rukun Tetangga (RT).

Gambar 6. Persentase luas desa di Kecamatan Dukuhwaru



Sumber: BPS Kabupaten Tegal

Gambar di atas merupakan informasi tentang persentase luas wilayah sepuluh desa di Kecamatan Dukuhwaru, termasuk Desa Sindang. Dari gambar di atas terlihat bahwa persentase luas Desa Sindang adalah yang paling kecil dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Dukuhwaru. Terlihat juga bahwa desa paling besar di Kecamatan Dukuhwaru adalah Desa Dukuhwaru yang merupakan Ibukota Kecamatan Dukuhwaru sendiri. Meski demikian jumlah RT dan RW di Desa Sindang cukup banyak, yakni dengan enam RW dan 24 RT.

Masih berdasarkan data dalam buku *Kecamatan Dukuhwaru dalam Angka 2023*, jarak dari Desa Sindang menuju ke Ibu Kota Kecamatan Dukuhwaru kurang lebih berjarak sekitar 1 km. Jarak ini bisa ditempuh selama 5 menit perjalanan dengan menggunakan sepeda motor. Untuk menuju Ibu Kota Kecamatan Dukuhwaru, menggunakan jalan raya utama Gumayun-Sindang-Pagiyanten.

Gambar 7. Jarak Desa Sindang dengan Ibukota Kecamatan Dukuhwaru



Sumber: BPS Kabupaten Tegal

Sampai pada akhir tahun 2022 lalu, jumlah penduduk di Desa Sindang ada sekitar 4.856 jiwa yang terdiri dari 2.448 penduduk laki-laki dan 2.408 penduduk perempuan. Sementara jumlah kepala keluarga (KK) pada tahun yang sama ada 1.603 KK. Jumlah penduduk Desa Sindang setara dengan 6,70 persen jumlah penduduk secara keseluruhan di Kecamatan Dukuhwaru, dengan kepadatan mencapai 2.943,03 penduduk/km² atau setiap 1 km persegi wilayah Desa Sindang dihuni oleh sekitar 2.943 orang.

Gambar 8. Kepadatan penduduk tiap desa di Kecamatan Dukuhwaru



Sumber: BPS Kabupaten Tegal

Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa Desa Sindang merupakan salah satu desa terpadat di Kecamatan Dukuhwaru. Kepadatan penduduk di Desa Sindang seperti dalam gambar masih di atas Desa Slaranglor (2.220,73 penduduk per km persegi), Desa Bulakpacing (2.005,22 penduduk per km persegi), Desa Selapura (1.933,82 penduduk per km persegi), Desa Kabunan (1.900,27 penduduk per km persegi), dan Desa Gumayun (1.575,43 penduduk per km persegi).

Sementara itu di Desa Sindang terdapat sejumlah fasilitas umum seperti dua Sekolah Dasar (SD) Negeri, satu taman anak-anak atau TK dan satu tempat untuk pendidikan anak usia dini atau PAUD. Selain fasilitas pendidikan ada juga fasilitas ibadah berupa 11 mushala dan tiga masjid. Di Desa Sindang juga terdapat fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan desa atau Poskesdes untuk layanan kesehatan masyarakat Desa Sindang.

IV.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sindang

Sejak tahun 2019 lalu, Desa Sindang dipimpin oleh seorang kepala desa bernama Rusdi Hadi. Dirinya akan menjabat sampai tahun 2025 mendatang. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, Rusdi Hadi dibantu oleh sejumlah perangkat desa seperti sekretaris desa, kepala seksi dan kepala urusan atau kaur. Di bawah ini tabel struktur organisasi Pemerintahan Desa Sindang periode 2019-2025.

Tabel 5. Struktur Pemerintah Desa Sindang

NO	NAMA	JABATAN
1.	Rusdi Hadi	Kepala Desa
2.	Santoso	Sekretaris Desa
3.	Ratno Sumanto	Kasi Kesejahteraan
4.	Imam Sucipto	Kasi Pelayanan
5.	Diki Alamsyah	Kaur Tata Usaha
6.	Lukman Nurhakim	Kaur Keuangan
7.	Irfan Murtako	Kaur Perencanaan
8.	Saher	Kaur Pemerintahan

Di Desa Sindang juga ada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. BPD Desa Sindang saat ini diketuai oleh Sutikno dengan wakilnya bernama Suqwad. Selain Sutikno dan Suqwad, ada lima orang lain yang menjadi anggota BPD Desa Sindang periode 2018-2024. Di bawah ini adalah tabel struktur BPD Desa Sindang.

Tabel 6. Struktur BPD Desa Sindang

NO	NAMA	JABATAN
1.	Sutikno	Ketua
2.	Suqwad	Wakil Ketua
3.	Syefullah	Sekretaris
4.	Rudi Hartono	Bidang Pembangunan
5.	Surniati	Bidang Pemerintahan
6.	Rokhmatullah	Anggota
7.	Widiarti	Anggota

Berikut ini peneliti sajikan nama-nama ketua RT dan ketua RW di Desa Sindang.

Tabel 7. Nama-nama Ketua RW dan Ketua RT Desa Sindang

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. Kambali	Ketua RW 01
2.	Bardo	Ketua RT 01 RW 01
3.	Jaenal Maulana	Ketua RT 02 RW 01
4.	Sugeng Santoro	Ketua RT 03 RW.01
5.	Sairin	Ketua RT 04 RW 01
6.	Sanuri	Ketua RT 05 RW 01
7.	Sutarno	Ketua RW 02
8.	Robil	Ketua RT 01 RW 02
9.	Edi Sahroni	Ketua RT 02 RW 02
10.	Sarno	Ketua RT 03 RW 02
11.	Sudiharso	Ktua RT 04 RW 02
12.	Sudarno	Ketua RW 03
13.	Subur	Ketua RT 01 RW 03
14.	Ranto	Ketua RT 02 RW 03
15.	Mahmuji	Ketua RT 03 RW 03
16.	Hartoyo	Ketua RT 04 RW 03
17.	Sukono	Ketua RW 04
18.	Sakuri	Ketua RT 01 RW 04
19.	Karim	Ketua RT 02 RW 04
20.	Sudarno	Ketua RT 03 RW 04
21.	Tarjono	Ketua RT 04 RW 04
22.	Karso	Ketua RW 05
23.	Dul Ihak	Ketua RT 01 RW 05
24.	Samsuri	Ketua RT 02 RW 05
25.	Asmari	Ketua RT 03 RW 05
26.	Cokro Winoto	Ketua RW 06
27.	Carsa	Ketua RT 01 RW 06
28.	Ritoni	Ketua RT 02 RW 06
29.	Warto	Ketua RT 03 RW 06
30.	Subadri	Ketua RT 04 RW 06